



LANDASAN PENDIDIKAN: KONSEP, TUJUAN, DAN PERANANNYA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Ahmad Gojali Harahap^{1*}, Laila Damayanti², Umam Khausar Siregar³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

*Penulis Korespondensi: gozaliahmadd39@gmail.com¹, lailadamayanti587@gmail.com²,
kendygilang67@gmail.com³

Abstract. *The reality shows that educational practices in Indonesia still face a fundamental problem in the form of unclear foundations supporting its implementation, resulting in inconsistency between national education goals and their implementation in the field. This study aims to comprehensively examine the concept of educational foundations, the objectives to be achieved, and their role in the Indonesian national education system. The method used is library research with a descriptive-analytical approach. The results show that educational foundations encompass four main dimensions: philosophical (Pancasila), juridical (Law No. 20/2003 on National Education System), sociological-cultural, and scientific-technological. These four dimensions interact to shape the direction, objectives, and strategies of national education. The conclusion affirms that a deep understanding and consistent implementation of educational foundations is an absolute prerequisite for realizing fully developed Indonesian human beings as mandated by the constitution.*

Keywords; *Educational Foundations, National Education System, Educational Objectives, Philosophy of Education, Education Policy.*

Abstrak. Kenyataan menunjukkan bahwa praktik pendidikan di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar berupa ketidakjelasan fondasi yang menopang penyelenggaraannya, sehingga terjadi ketidakkonsistenan antara tujuan pendidikan nasional dengan implementasinya di lapangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif konsep landasan pendidikan, tujuan yang hendak dicapai, serta peranannya dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa landasan pendidikan mencakup empat dimensi utama: filosofis (Pancasila), yuridis (UU Sisdiknas No. 20/2003), Sosiologis-Kultural, Keempat dimensi ini saling berinteraksi dalam membentuk arah, tujuan, dan strategi pendidikan nasional. Kontribusi penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pada dunia Pendidikan di Indonesia.

Kata kunci; Landasan Pendidikan, Sistem Pendidikan Nasional, Tujuan Pendidikan, Filsafat Pendidikan, Kebijakan Pendidikan.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus instrumen strategis dalam mewujudkan cita-cita nasional. Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, sementara Ayat (3) mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Amanat konstitusional ini kemudian dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Namun demikian, realitas menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara *das sollen* (yang seharusnya) dan *das sein* (kenyataan) dalam penyelenggaraan pendidikan Indonesia. Data PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-68 dari 81 negara dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan Indonesia belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan yang diamanatkan. Persoalan mendasar yang kerap menjadi sumber masalah adalah ketidakjelasan, ketidakkonsistensian, bahkan kadang kala keterputusan antara landasan pendidikan yang seharusnya menjadi fondasi dengan praktik pendidikan aktual di lapangan.

Berbagai permasalahan konkret yang dapat diidentifikasi antara lain, (1) kurikulum yang terlalu sering berganti tanpa kejelasan landasan filosofis yang konsisten, (2) praktik pembelajaran yang masih didominasi pendekatan teacher-centered dan hafalan, bertentangan dengan landasan ilmiah tentang cara efektif manusia belajar, (3) penilaian pendidikan yang lebih menekankan dimensi kognitif semata, mengabaikan dimensi afektif dan psikomotorik, serta (4) kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah yang mencerminkan lemahnya implementasi landasan yuridis keadilan pendidikan. Permasalahan-permasalahan ini secara tertulis dirumuskan dalam penelitian ini sebagai: "Bagaimana landasan Pendidikan secara konseptual, tujuan, dan perannya dapat menjadi solusi bagi permasalahan sistemik penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia?"

Kajian tentang landasan pendidikan bukan hal baru, namun tetap relevan dan mendesak di tengah berbagai perubahan zaman. Pondasi pendidikan adalah disiplin yang memberikan justifikasi rasional bagi praktik pendidikan. Setiap pendidik disadari atau tidak selalu beroperasi berdasarkan seperangkat asumsi filosofis tertentu tugas kajian landasan pendidikan adalah membuat asumsi-asumsi tersebut menjadi eksplisit, kritis, dan konsisten.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama, (1) Apa konsep landasan pendidikan dan apa saja jenisnya? (2) Apa tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan landasan pendidikan? (3) Bagaimana peran landasan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia? Ketiga pertanyaan penelitian ini dijawab melalui kajian pustaka yang sistematis dan kritis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan sebagai "serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian." Metode ini dipilih karena penelitian ini bersifat konseptual analitis yang bertujuan membangun pemahaman teoretis komprehensif tentang landasan pendidikan berdasarkan literatur yang ada (Prasetyo dkk, 2022).

Sumber data penelitian mencakup: (a) sumber primer, meliputi UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan karya-karya klasik filsafat pendidikan; (b) sumber sekunder, meliputi buku teks pendidikan, jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks Scopus dan SINTA, disertasi dan tesis relevan, serta laporan resmi lembaga pendidikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur sistematis menggunakan basis data Google Scholar, ERIC (*Education Resources Information Center*), Scopus, dan repositori Perpustakaan Nasional RI. Kata kunci yang digunakan: "landasan pendidikan," "filsafat pendidikan," "sistem pendidikan nasional," "*foundations of education*," dan "*educational philosophy*." Kriteria inklusi literatur meliputi, relevansi topik, kredibilitas penulis/lembaga penerbit, dan keterbaruan (untuk artikel jurnal, diprioritaskan terbitan 10 tahun terakhir).

Analisis data menggunakan dua teknik: (1) analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan mendeskripsikan konsep-konsep kunci landasan pendidikan, dan (2) analisis kritis (*critical analysis*) untuk mengevaluasi relevansi dan implikasi konsep-konsep tersebut dalam konteks sistem pendidikan nasional. Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai sumber berbeda untuk memastikan konsistensi dan kebenaran informasi (Najib et al., 2026).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Jenis Landasan Pendidikan

Secara etimologis, "landasan" bermakna dasar, alas, atau fondasi tempat berpijak dan titik tolak suatu aktivitas. Dalam konteks pendidikan, landasan pendidikan sebagai "seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan." *Foundations of*

education mencakup semua disiplin ilmu yang memberikan kontribusi dalam memahami hakikat, tujuan, dan proses pendidikan. Sintesis dari berbagai pandangan ahli menunjukkan bahwa landasan pendidikan adalah fondasi multidimensi yang menentukan arah dan cara penyelenggaraan pendidikan.

Hasil kajian mengidentifikasi empat jenis landasan pendidikan yang saling berinteraksi dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yaitu, pertama, Landasan Filosofis. Landasan filosofis merupakan fondasi paling mendasar karena berkenaan dengan pertanyaan eksistensial tentang hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai (Ikhtiarini & Yusuf, 2025). Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan nasional. Nilai-nilai Pancasila menjiwai seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan: sila pertama menegaskan dimensi religius pendidikan; sila kedua menuntut pendidikan yang memanusiakan manusia; sila ketiga mengharuskan pendidikan membangun persatuan; sila keempat mewajibkan pendidikan berproses secara demokratis; dan sila kelima mengamanatkan pendidikan berkeadilan sosial (Mustaqimah et al., 2024). Secara evaluatif, landasan filosofis Pancasila bersifat integratif karena memadukan nilai-nilai religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan keadilan sosial dalam satu kesatuan yang tidak ditemukan dalam filsafat pendidikan manapun di dunia (Layinah & Syahidin, 2025).

Kedua, Landasan Yuridis. Landasan yuridis atau landasan hukum pendidikan adalah seperangkat regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pendidikan, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi semua pemangku kepentingan. Hierarki landasan yuridis pendidikan Indonesia meliputi: UUD 1945 Pasal 31 (tertinggi), UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, PP No. 57/2021 tentang SNP, hingga Peraturan Menteri. Analisis terhadap UU Sisdiknas menunjukkan bahwa undang-undang ini komprehensif namun tantangannya terletak pada implementasi, terutama dalam memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali (Masfufah & Salito, 2025).

Ketiga, Landasan Sosiologis-Kultural. Landasan sosiologis memandang pendidikan sebagai proses sosialisasi dan enkulturasi dalam konteks masyarakat dan budaya tertentu. Pendidikan sebagai alat masyarakat untuk mereproduksi dirinya dan mempertahankan kohesi sosial. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dengan lebih dari 300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah, landasan sosiologis-kultural menuntut

pendidikan yang mampu menghargai keberagaman sambil membangun identitas nasional yang bersatu (Bhinneka Tunggal Ika). Secara kritis, kajian menunjukkan bahwa ketegangan antara globalisasi budaya dan pelestarian kearifan lokal menjadi tantangan utama landasan sosiologis-kultural pendidikan Indonesia kontemporer (Abdilah, 2025).

Keempat, Landasan Ilmiah Teknologis. Landasan ilmiah teknologis menuntut pendidikan untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan neurosains pendidikan terutama riset *brain compatible learning* mengungkap bahwa otak belajar paling efektif melalui pengalaman langsung, konteks bermakna, dan umpan balik segera (Ihsan dkk, 2025). Temuan ini secara ilmiah menyanggah dominasi metode ceramah (*lecturing*) yang masih mendominasi praktik pembelajaran di Indonesia. Lebih lanjut, era Society 5.0 menuntut pendidikan mempersiapkan kompetensi abad ke-21, *critical thinking, creativity, communication, dan collaboration* (Fadel dkk, 2015).

Tujuan Landasan Pendidikan

Secara analitis, penetapan landasan pendidikan yang kokoh bertujuan untuk, (a) memberikan arah dan orientasi yang jelas bagi penyelenggaraan pendidikan, (b) menjamin konsistensi dan koherensi antara berbagai komponen sistem Pendidikan, (c) menjadi standar evaluasi dan penilaian kualitas Pendidikan, (d) memberikan justifikasi dan legitimasi bagi setiap kebijakan dan praktik Pendidikan, serta (e) memfasilitasi adaptasi pendidikan terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental. Kelima tujuan ini saling berkaitan dan membentuk fungsi regulatif landasan pendidikan terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan.

Tujuan pendidikan nasional Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU Sisdiknas 2003, adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan yang komprehensif ini mencerminkan sintesis dari keempat landasan pendidikan. Dimensi "beriman dan bertakwa" berakar pada landasan filosofis Pancasila; "demokratis dan bertanggung jawab" mencerminkan landasan yuridis; "sehat dan berilmu" berakar pada landasan ilmiah; sedangkan "mandiri dan kreatif" mencerminkan kebutuhan sosiologis masyarakat modern.

Pengklasifikasikan tujuan pendidikan ke dalam tiga ranah yaitu, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Evaluasi terhadap praktik pendidikan Indonesia menunjukkan ketimpangan sistem ujian dan evaluasi masih sangat mengedepankan ranah kognitif, sementara ranah afektif (pembentukan karakter dan nilai) dan psikomotorik (keterampilan praktis) kurang mendapat perhatian proporsional (Azwa dkk, 2025). Ini adalah bukti nyata dari lemahnya implementasi landasan pendidikan dalam desain sistem evaluasi nasional. Asesmen Nasional yang diluncurkan pada 2021 merupakan respons kebijakan yang mengintegrasikan pengukuran literasi, numerasi, dan karakter sekaligus sebuah langkah yang lebih selaras dengan tujuan pendidikan multidimensi.

Peran Landasan Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (UU Sisdiknas, Pasal 1 Ayat 3). Analisis menunjukkan bahwa landasan pendidikan memainkan peran regulatif, integratif, dan transformatif dalam setiap komponen sistem ini.

Dalam dimensi kurikulum, landasan filosofis dan sosiologis menentukan seleksi dan organisasi pengetahuan yang diajarkan. Kurikulum Merdeka yang diluncurkan Kemendikbudristek pada 2022 mencerminkan pergeseran landasan: dari kurikulum preskriptif yang seragam menuju kurikulum adaptif yang menghargai keberagaman kebutuhan dan konteks peserta didik. Prinsip "Merdeka Belajar" secara filosofis berakar pada pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan dan menghargai kodrat alam serta kodrat zaman. Secara sosiologis, kurikulum baru ini juga mendorong pengintegrasian kearifan lokal (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila/P5) sebagai muatan substantif.

Dalam dimensi pembelajaran, landasan ilmiah-teknologis menjadi panduan utama. Vygotsky dengan teori Zone of Proximal Development (ZPD) dan konsep *scaffolding* memberikan basis ilmiah bagi strategi pembelajaran diferensiasi yang diterapkan dalam Kurikulum Merdeka. Sementara Gardner dengan teori Multiple Intelligences melandasi kebutuhan akan pembelajaran yang mengakomodasi keberagaman kecerdasan peserta didik. Kedua teori ini secara konsisten menyanggah model pembelajaran satu-ukuran-untuk-semua (*one-size-fits-all*) yang masih dominan di kelas-kelas Indonesia.

Dalam dimensi tenaga pendidik, landasan yuridis (UU No. 14/2005) menetapkan empat kompetensi guru: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Namun,

pengembangan profesional guru yang efektif harus bersifat berkelanjutan, berbasis sekolah, dan terhubung dengan praktik pembelajaran actual bukan sekadar pelatihan singkat sporadis. Evaluasi terhadap implementasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Indonesia menunjukkan masih perlunya penyesuaian antara substansi pelatihan dengan kebutuhan nyata di lapangan, sebuah tantangan yang berakar pada belum optimalnya integrasi landasan ilmiah dalam desain pengembangan profesi guru (Khairani dkk, 2024).

Dalam dimensi evaluasi pendidikan, pergeseran dari Ujian Nasional ke Asesmen Nasional mencerminkan perubahan paradigma yang lebih selaras dengan landasan ilmiah. Asesmen Nasional mengukur kompetensi minimum literasi dan numerasi serta survei karakter dan lingkungan belajar, sehingga lebih komprehensif dalam menggambarkan kualitas pendidikan. Pergeseran ini didukung oleh landasan sosiologis yang mengakui bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur hanya dari penguasaan materi akademik, melainkan juga dari kualitas ekosistem sekolah (Solekha dkk, 2024).

Dalam dimensi manajemen pendidikan, landasan sosiologis dan yuridis mendorong desentralisasi yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah. UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan pengintegrasian muatan lokal dalam kurikulum. Secara analitis, desentralisasi pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lokal, namun juga berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas antardaerah apabila tidak diimbangi standar minimal yang kuat dan mekanisme penjaminan mutu yang efektif (dkk, 2025).

Landasan Pendidikan dalam Perspektif Komparatif

Pemahaman yang lebih komprehensif tentang landasan pendidikan Indonesia dapat diperoleh melalui perspektif komparatif. Perbandingan ini bukan untuk meniru, melainkan untuk mengambil pelajaran yang dapat diadaptasi sesuai konteks Indonesia (Fijriah dkk, 2024).

Finlandia, yang secara konsisten menempati peringkat teratas PISA, membangun pendidikannya di atas landasan filosofis yang menempatkan kepercayaan (trust) sebagai nilai sentral. Kepercayaan diberikan kepada guru sebagai profesional kompeten, kepada siswa sebagai subjek belajar bertanggung jawab, dan kepada sekolah sebagai komunitas belajar yang otonom. Guru di Finlandia, yang wajib memiliki gelar master, diberi kebebasan penuh dalam memilih metode dan materi pembelajaran. Implikasinya bagi

Indonesia, peningkatan kualifikasi dan otonomi profesional guru perlu menjadi prioritas kebijakan (Asbari & Sunandar, 2026).

Jepang membangun pendidikannya di atas landasan sosiologis kultural yang kuat, tercermin dalam konsep *Monozukuri* (ketekunan berkarya) dan sistem *lesson study* pendekatan kolaboratif pengembangan pembelajaran berbasis komunitas guru yang telah diadopsi lebih dari 50 negara (Gusriani dkk, 2025). Dari Jepang, Indonesia dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya kolaborasi antarguru sebagai landasan pengembangan profesional yang berkelanjutan.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa kekayaan nilai filosofis Pancasila yang integratif dan kearifan lokal yang beragam. Tantangannya adalah mengoperasionalkan keunggulan ini ke dalam kebijakan dan praktik pendidikan yang konkret, terukur, dan berkeadilan. Kurikulum Merdeka dengan P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) merupakan langkah strategis ke arah itu, meski implementasinya masih memerlukan dukungan kapasitas yang lebih kuat (Khotrunada & Widiyanah, 2024).

Landasan Pendidikan dan Pendidikan Karakter

Salah satu implikasi terpenting landasan pendidikan berbasis Pancasila adalah penguatan pendidikan karakter. Annisa dkk (2023) mengemukakan bahwa karakter yang baik terdiri dari tiga komponen, mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*loving the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*). Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) mengidentifikasi lima nilai karakter utama yang berakar pada Pancasila: religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas.

Secara sosiologis, pendidikan karakter yang efektif menuntut sinergi tiga pilar: sekolah sebagai pusat pembiasaan nilai, keluarga sebagai laboratorium pertama karakter, dan masyarakat sebagai medan ujian karakter (Fauzil, 2021). Kelemahan mendasar yang teridentifikasi dalam kajian ini adalah belum terwujudnya sinergi ketiga pilar ini secara sistemik sekolah sering bekerja sendirian dalam pembentukan karakter tanpa dukungan memadai dari ekosistem keluarga dan masyarakat. Landasan sosiologis kultural pendidikan menegaskan bahwa kearifan lokal gotong royong, tepa selira, dan musyawarah mufakat merupakan modal sosial tak ternilai yang harus diintegrasikan ke dalam program pendidikan karakter (Iryani dkk, 2025).

Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan

Kajian mengidentifikasi lima tantangan sistemik dalam implementasi landasan pendidikan Indonesia. Pertama, kesenjangan kualitas guru antardaerah yang sangat signifikan. Data Kemendikbudristek (2023) menunjukkan lebih dari 1 juta guru masih belum memenuhi kualifikasi akademik yang disyaratkan UU Guru dan Dosen. Rekomendasi: revitalisasi PPG dengan penguatan kajian landasan pendidikan dan penerapan insentif penempatan guru yang berkeadilan.

Kedua, ketidakkonsistenan kebijakan kurikulum. Pergantian kurikulum yang terlalu sering dari KBK (2004), KTSP (2006), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka (2022) menimbulkan kelelahan institusional (*institutional fatigue*) di kalangan guru dan sekolah (Bjork, 2009). Rekomendasi pembentukan road map pendidikan jangka panjang (25-50 tahun) yang melampaui siklus politik. Ketiga, kesenjangan digital yang diekspos secara brutal oleh pandemi COVID-19 (2020-2022). Keempat, inefisiensi pembiayaan pendidikan di mana sebagian besar anggaran tersedot untuk belanja pegawai. Kelima, lemahnya koordinasi antara Kementerian Pendidikan dengan kementerian/lembaga lain yang relevan, terutama Kementerian Agama yang mengelola madrasah dan pesantren.

Secara sintesis, penguatan landasan pendidikan Indonesia memerlukan pendekatan ekosistem yang melibatkan semua pemangku kepentingan: pemerintah pusat dan daerah, LPTK, sekolah, guru, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi profesi. Tanpa pendekatan ekosistem ini, penguatan landasan pendidikan hanya akan berhenti pada level wacana normatif dan tidak berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan yang nyata dan berkelanjutan (Wardani, 2025).

4. KESIMPULAN

Sebagaimana dirumuskan dalam pendahuluan, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah ketidakkonsistenan antara landasan pendidikan yang seharusnya menjadi fondasi dengan praktik penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia. Hasil kajian menegaskan bahwa landasan pendidikan Indonesia mencakup empat dimensi yang saling berinteraksi filosofis (Pancasila), yuridis (UU Sisdiknas), sosiologis-kultural, dan ilmiah-teknologis yang secara integratif menentukan arah, tujuan, dan strategi pendidikan nasional. Landasan filosofis Pancasila yang bersifat integratif merupakan keunggulan komparatif unik Indonesia yang mampu memadukan nilai-nilai

religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan keadilan sosial; sementara implementasinya dalam kurikulum, pembelajaran, evaluasi, dan manajemen pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan sistemik yang perlu diatasi secara holistik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam dan implementasi konsisten atas landasan pendidikan merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana diamanatkan Pasal 3 UU Sisdiknas. Penguatan landasan pendidikan harus dilakukan melalui pendekatan ekosistem yang melibatkan semua pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah, LPTK, sekolah, guru, keluarga, hingga masyarakat luas dengan road map jangka panjang yang melampaui siklus politik, sehingga cita-cita pendidikan nasional dapat terwujud secara nyata, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.

DAFTAR REFERENSI

- Abdilah, F. (2025). Peran Organisasi Islam dalam Membangun Peradaban Modern. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(8), 213–221. <https://doi.org/10.30762/itr.v2i2.1005>
- Annisa, A. N. Et al. (2023). PENDIDIKAN KARAKTER PERSEPEKTIF THOMAS LICKONA (ANALISIS NILAI ISLAMI DALAM BUKU EDUCATING FOR CHARACTER) Aisyah Nur Annisa Institut Agama Islam Yasni Bungo M . Syukri Ismail Institut Agama Islam Yasni Bungo Mabru Institut Agama Islam Yasni Bungo Abst. El-Madib: *Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.51311/el-madib.v4i1.611>
- Asbari, M., & Sunandar, E. (2026). Dari Finlandia ke Sekolah Islam Indonesia : Review Kritis Konstruktif Buku Teach Like Finland dalam Perspektif Pedagogik Humanis. *Journal of Education and Learning Studies (JELS)*, 1(1), 28–42. Result score too low
- Azwa, N. Et al. (2025). Model evaluasi pembelajaran fiqih : Kajian teoritis terhadap ranah kognitif , afektif , dan psikomotorik. *Al Ikhlas Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.64677/ppai.v2i2.236>
- Fauzil, M. (2021). PENGUATAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER PESETA DIDIK. *An-Nuha*, 8(1). <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i2.368>
- Fijriah, H. Et al. (2024). Konsep Dasar Studi Perbandingan Pendidikan. *Moral : Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1(4), 233–247. <https://doi.org/10.61132/moral.v1i4.306>
- Gusriani, A. Et al. (2025). Studi Komparatif: Menilik Perbedaan dan Persamaan Pendidikan di Indonesia dan Jepang. *Alacrity : Journal Of Education*, 5(2), 855–867. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v5i2.771>
- Ihsan et al. (2025). Integrasi Neurosains dan Nilai-Nilai Islam Dalam Strategi Pembelajaran: Kajian Tentang Otak, Pendidikan dan Belajar. *SURIA Journal of Social, Educational and Religious Studies*, 1(3), 51–64. <https://doi.org/10.61689/inspirasi.v3i1.79>
- Ikhtiarini, S. A., & Yusuf, A. (2025). Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis dalam Filsafat Pendidikan sebagai Fondasi Pembangunan Sumber Daya Manusia.

- Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri, 11(4), 350–362. <https://doi.org/10.58218/lambda.v5i1.1205>
- Iryani, E. Et al. (2025). Integrasi nilai-nilai kearifan lokal melalui pendidikan karakter sebagai upaya pencegahan dekadensi moral. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, 6(10), 1085–1095. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v6i4.24117>
- Khairani, J. Et al. (2024). Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Peningkatan Kompetensi Profesional Guru. *Cemara Journal*, 2(4), 2987–4092. <https://doi.org/10.31219/osf.io/a2t8q>
- Khotrunada, A., & Widiyanah, I. (2024). PANCASILA SEBAGAI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER SISWA DI SEKOLAH INKLUSI (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 1. *E-Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 12(1), 247–261. <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.6947>
- Layinah, L., & Syahidin. (2025). Landasan Filosofis Pendidikan Agama Islam Ditinjau Dalam Perspektif Filsafat Pancasila. *JURNAL EL-BADR*, 1(2). Result score too low
- Masfufah, N., & Salito. (2025). DASAR DASAR YURIDIS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL KERANGKA HUKUM PENDIDIKAN NASIONAL: KONSEP, LANDASAN, HAK- KEWAJIBAN, WAJIB BELAJAR, DAN STUKTUR SISTEM PENDIDIKAN. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 160–172. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v17i1.816>
- Mustaqimah, D. Et al. (2024). Pancasila sebagai Landasan Filosofis Pendidikan Nasional. *COGNITIVE: JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN*, 2(3), 3026–1686. <https://doi.org/10.61743/cg.v2i3.96>
- Najib, M. A. Et al. (2026). Validitas dan Realibilitas dalam Penelitian Kualitatif. *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1507–1518. Result score too low
- Prasetyo, E. B. Et al. (2022). Asumsi Dasar pada Ilmu Pengetahuan yang menjadi Basis Penelitian Pendidikan Islam. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 380–386. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i2.435>
- Saragih, P. Y. Et al. (2025). Pengaruh Politik Desentralisasi dan Budaya Daerah terhadap Mutu Pendidikan Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 2548–6950. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v9i1.4929>
- Solekha, S. Et al. (2024). Kebijakan Asesmen Kompetensi Minimum. *Dharmas Education Journal*, 5(2), 972–979. <https://doi.org/10.56667/dejournal.v5i2.1573>
- Wardani, R. R. W. A. (2025). Dinamika Ekosistem Pendidikan dan Implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam di lingkungan Sekolah Formal. *Action Research Journal Indonesia*, 7(4), 319–3213. <https://doi.org/10.61227/arji.v7i4.606>